



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI XI DPR RI

MEMBIDANGI : KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (PPN)/BAPPENAS, BANK INDONESIA, OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK), LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS), BADAN PUSAT STATISTIK (BPS), BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), SETJEN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP), LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI), PERBANKAN, DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB).

Rapat Ke	:	
Tahun Sidang	:	2015-2016
Masa Persidangan	:	III
Jenis Rapat/ke-	:	Rapat Kerja /ke -
Dengan	:	Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari,Tanggal	:	Kamis, 17 Maret 2016
Waktu	:	11.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi XI DPR RI Gedung Nusantara I lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Ketua Rapat	:	IR. H. AHMADI NOOR SUPIT
Sekretaris Rapat	:	Drs. Urip Sudjarwono
A c a r a	:	1. Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap RUU tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. 2. Pengambilan keputusan tentang RUU tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
H a d i r	:	1. dari 48 orang Anggota Komisi XI DPR RI; 2. Menteri Keuangan beserta jajaran; 3. Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran

I. PENDAHULUAN :

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat Membuka Rapat pada pukul 11. 30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, didahului dengan Pengantar Ketua Rapat dilanjutkan dengan penyampaian pandangan fraksi-fraksi.

II. KEPUTUSAN/KESIMPULAN :

Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dan Pemerintah (Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM) diawali dengan penyampaian Pendapat Akhir Mini Fraksi dan Pendapat Akhir Mini Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Dalam Pendapat Akhir Mini Fraksi, seluruh Fraksi di Komisi XI DPR RI (Fraksi PDIP, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PKB, Fraksi PKS, Fraksi PPP, Fraksi Partai NasDem dan Fraksi Partai Hanura) dan Pemerintah menyetujui RUU tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan disampaikan dalam Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.30 WIB.

Jakarta, 17 Maret 2016

**PIMPINAN KOMISI XI DPR RI
KETUA RAPAT,**



IR. AHMADI NOOR SUPIT